RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/OT.140/2/2011 Tanggal 06 September 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang adalah unit pelaksana teknis dibidang pelatihan pertanian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan sehari-hari dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya BBPP Binuang menyelenggarakan fungsi: (1) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama; (2) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan; (3) Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian; (4) Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur; (5) Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan nonaparatur pertanian dalam dan luar negeri; (6) Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan nonaparatur; (7) Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian; (8) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian; (9) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut; (10) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya; (11) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian; (12) Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur; (13) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian; (14) Pengelolaan unit inkubator usaha tani; (15) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian; (16) Pelaksanaan pengelolaan

data dan informasi pelatihan serta pelaporan; (17) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; dan (18) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Binuang.

Dengan berpedoman pada visi pembangunan pertanian dan arah kebijakan pengembangan SDM Pertanian, serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pelatihan dibidang pertanian, maka Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang mempunyai visi "Menjadi Centre Of Exellence dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM Pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berwawasan global". Untuk mewujudkan visi tersebut, BBPP Binuang menetapkan misi yang dilaksanakan dalam tahun 2010 – 2014, yaitu: (1) Meningkatkan kualitas rencana program, pemantauan evaluasi, pelaporan dan pengendalian; (2) Meningkatkan pelaksanaan kerjasama, jejaring kerja dan sistem informasi pertanian; (3) Mendayagunakan sumberdaya manusia *(brainware),* prasarana dan sarana *(hardware)* Balai dalam rangka pengembangan SDM Pertanian; (4) Meningkatkan kompetensi ketenagaan pelatihan; (5) Meningkatkan kualitas pelaksanaan, sistem dan prosedur dan norma penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan teknik pelatihan teknis, fungsional, kewirausahaan; (6) Meningkatkan kualitas pelayanan konsultasi agribisnis dan pengembangan pola/model pelatihan teknis, dan kewirausahaan pertanian; dan (7) Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, manajemen monitoring dan evaluasi.

Mengacu pada visi dan misi tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh BBPP Binuang pada tahun 2010-2014 adalah: (1) Menata kelembagaan pelatihan pertanian; (2) Meningkatkan kinerja ketenagaan pelatihan pertanian; (3) Meningkatkan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian; (4) Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani; dan (5) Meningkatkan mutu layanan pelatihan.

Berdasarkan tujuan tersebut, ditetapkanlah sasaran strategis BBPP Binuang tahun 2010-2014, yaitu: (1) Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian; (2) Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi; (3) Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja; (4) Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan; dan (5) Terfasilitasinya Pelayanan Perkantoran.

Berdasarkan sasaran tersebut pada tahun 2013 Rencana Kerja Tahunan BBPP Binuang mencakup: (1) Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian sebanyak 23 unit terdiri dari 1 unit kelembagaan pelatihan pertanian dan 22 unit kelembagaan pelatihan milik petani (P4S); (2) Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi sebanyak 79 orang; (3) Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja sebanyak 1.454 orang aparatur dan 570 orang non aparatur; (4) Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan sebanyak 10 dokumen; dan (5) Terfasilitasinya Pelayanan Perkantoran selama 12 bulan. Program yang dilaksanakan BBPP Binuang pada tahun 2013 adalah Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani dengan kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan BBPP Binuang pada tahun 2013 menunjukkan capaian rata-rata realisasi fisik 101,62%, dan realisasi serapan anggaran sebesar Rp.21.934.327.154 atau 91,72% dari target anggaran sebesar Rp. 23.906.378.000.
Hasil pengukuran kinerja pada sasaran strategis “Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian” menunjukkan realisasi fisik sebesar 104,35% sedang realisasi keuangan adalah Rp.606.827.173 atau 89,63% dari target pagu anggaran sebesar Rp 677.045.000. Realisasi fisik pada sasaran strategis “Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi” adalah 100,00%, sedang realisasi keuangannya Rp.266.368.200 atau 75,59% dari target pagu anggaran sebesar Rp 352.367.000. Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis “Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja” menunjukkan realisasi fisik sebesar102,74% dan kinerja keuangan Rp.9.350.023.394 atau 90,65% dari target pagu anggaran sebesar Rp 10.314.738.000. Pada sasaran strategis “Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan” realisasi fisik adalah 100,00%, sedangkan realisasi kinerja keuangan adalah Rp.1.140.468.287 atau 83,04% dari target pagu anggaran sebesar Rp 1.373.404.000. Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis “Terfasilitasinya Pelayanan Perkantoran” realisasi fisik 100,00%%, dan realisasi keuangan Rp.10.563.622.230 atau 94,41% dari target pagu anggaran sebesar Rp 11.188.824.000.

Pencapaian kinerja BBPP Binuang pada tahun 2013 yakni rata-rata realisasi fisik 101,62% mencapai Nilai Atribut Interpretasi Fisik yang termasuk kategori AA (sangat memuaskan). Tingkat realisasi serapan anggaran secara keseluruhan sebesar

Rp.21.934.327.154 (91,72%) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 23.906.378.000. Nilai rata-rata persentasi realisasi anggaran yang dihitung berdasarkan realisasi anggaran masing-masing dari lima sasaran strategis adalah 86,66%. Berdasarkan Nilai Atribut Interpretasi Anggaran tingkat serapan anggaran ini juga termasuk kategori AA (sangat memuaskan). Secara keseluruhan berdasarkan Nilai Atribut Interpretasi Anggaran dan Nilai Atribut Interpretasi Fisik, didapatkan Nilai Atribut dan Interpretasi Kinerja BBPP Binuang Tahun 2013 sebesar 94,14% yang termasuk kategori AA (sangat memuaskan). Terdapat efisiensi pada pencapaian kelima sasaran strategis yang berkisar antara 0,06 sampai dengan 0,24 dengan rata-rata efisiensi sebesar 0,15 atau 15%.

Meskipun capaian kinerja kegiatan telah mencapai target dan termasuk dalam kategori efisien, namun masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pada tahun 2013. Untuk mengatasi masalah dan kendala ini maka pada tahun 2012 perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan; peningkatan koordinasi baik intern organisasi maupun koordinasi dengan instansi pengguna jasa diklat, instansi penyelenggara diklat dan pemangku kepentingan pelatihan lainnya; peningkatan jumlah dan kualitas kompetensi SDM BBPP Binuang; pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dengan lebih intensif serta peningkatan komitmen para pejabat dan pelaksana di semua tingkatan manajemen.

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/OT.140/9/2011 tanggal 06 September 2011 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan pertanian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian serta secara teknis sehari-hari dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBPP Binuang ini disusun dengan berpedoman kepada Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) nomor 29 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010. LAKIP BBPP Binuang Tahun 2013 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2013.

Kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan telah tersusunnya LAKIP ini dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terkait yang memerlukannya.

Binuang, Januari 2014

Ir. Anwar Syarif, M.Ed
NIP. 19580623 198103 1 001

DAFTAR ISI

		Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF		i
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vi
DAFTAR GAMBAR		vii
DAFTAR TABEL		viii
DAFTAR LAMPIRAN		ix
BAB I.	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas Fungsi	2
	C. Organisasi dan Tata Kerja	3
	D. Lingkungan Strategis Organisasi	10
BAB II.	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis	12
	B. Rencana Kinerja Tahunan	16
	C. Penetapan Kinerja	20
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Hasil Pengukuran Kinerja	22
	B. Penilaian Pencapaian Kinerja	23
	C. Analisis Kinerja	27
	D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja	27
BAB IV.	PENUTUP	

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kerja Tahun 2010 - 2014 11

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan BBPP Binuang 13

Tabel 3. Penetapan Kinerja BBPP Binuang Tahun 2013..... 17

Tabel 4. Revisi Penetapan Kinerja BBPP Binuang Tahun 2013 18

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja BBPP Binuang Tahun 2013 20

Tabel 6. Realisasi Serapan Anggaran BBPP Binuang Tahun 2010 - 2013..... 26

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi BBPP Binuang 3

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Status Kepegawaian 30
2. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 30
3. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Pangkat / Golongan..... 31
4. Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Jenjang Jabatan 32
5. Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Tingkat Pendidikan 32
6. Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja dan Analisa Pencapaian Kinerja Tahun 2013 33

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah perkembangannya Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, berdiri sejak tahun 1952 dengan nama Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD), pada tahun 1953 berubah menjadi Pusat Kursus Pertanian Kalimantan (PKPK) dan pada tahun 1969 berubah menjadi Pusat Pengembangan Pertanian. Seiring pesatnya perkembangan pembangunan khususnya pertanian, pada tahun 1975 berdasarkan SK Mentan No. 190/Kpts/Org./5/1975lembaga ini berubah lagi menjadi Pusat Latihan Pertanian (PLP). Dengan terbitnya SK Mentan No. 52/Kpts/Org./1/1978 tanggal 28 Januari 1978 lembaga ini berganti nama menjadi Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) Binuang. Pada tahun 2000 dengan terbitnya SK Mentan No. 84/Kpts/OT.210/2/2000 tanggal 29 Pebruari 2000 lembaga ini berganti nama menjadi Balai Diklat Pertanian (BDP) Binuang. Sampai pada tahun 2002, dengan terbitnya SK Mentan No. 333/Kpts/OT.210/5/2002 tanggal 8 Mei 2002 berganti nama lagi menjadi Balai Diklat Agribisnis Perkebunan dan Teknologi Pasang Surut (BDAPTPS) Binuang. Terakhir, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian RI No. 18/Permentan/OT.140/2/2007 pada tanggal 19 Pebruari 2007 lembaga ini resmi berganti nama menjadi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang dan dengan wilayah kerja regional Kalimantan.

Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannnya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Pada perkembangan selanjutnya yaitu pada tanggal 31 desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja instansi pemerintah dengan fasilitasi anggaran negara kepada masyarakat luas. LAKIP BBPP Binuang 2013 dibuat sebagai salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja BBPP Binuang selama tahun 2013.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49/Permentan/OT.140/9/2011 tanggal 06 September 2011 Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, BBPP Binuang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya BBPP Binuang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
2. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
4. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
5. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan nonaparatur pertanian dalam dan luar negeri;
6. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan nonaparatur;
7. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
8. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
9. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut;
10. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
11. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
12. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;

13. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknis pelatihan fungsional dan teknik di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;
14. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
15. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
16. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
17. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
18. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Binuang.

C. Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia Nomor 104/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang adalah sebagai berikut:

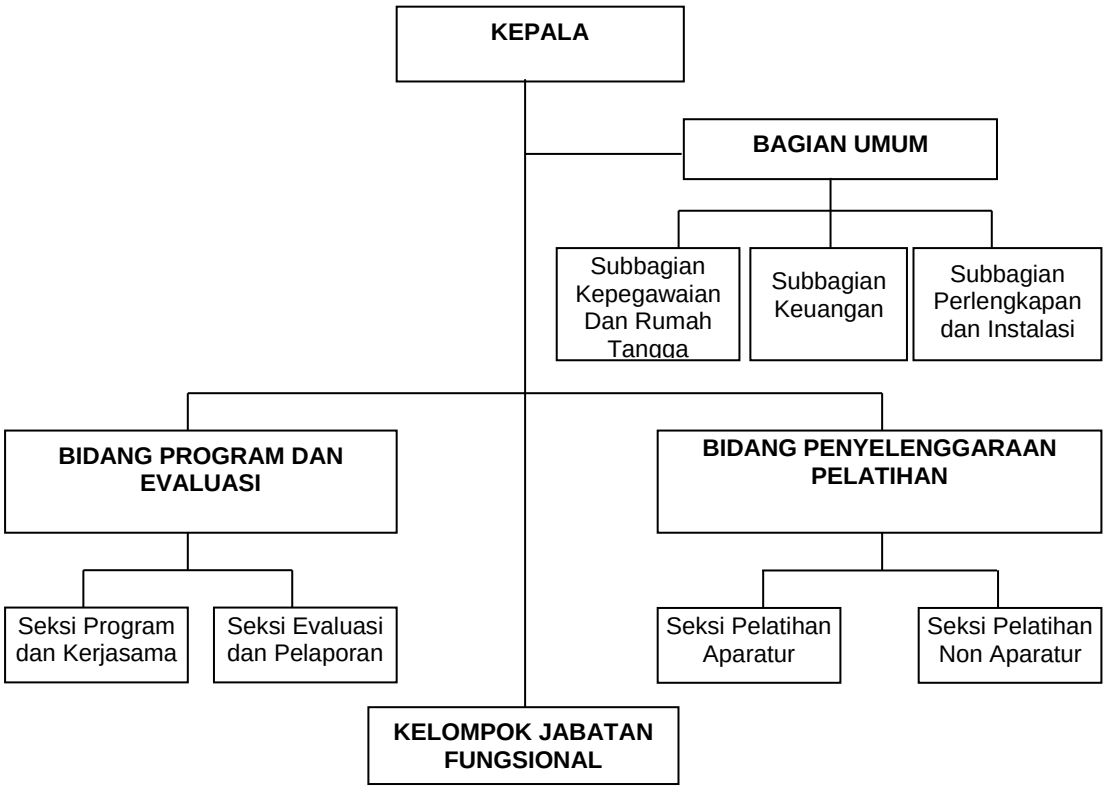

Gambar 1. Struktur Organisasi BBPP Binuang

1. Organisasi BBPP Binuang

BBPP Binuang terdiri 4 (empat) unit kerja yaitu:

a. Bagian Umum
b. Bidang Program dan Evaluasi
c. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan
d. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bagian/bidang secara rinci adalah sebagai berikut:

a. **Bagian Umum**

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, instalasi dan sarana teknis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

1) Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
2) Pelaksanaan urusan keuangan;
3) Pelaksanaan urusan perlengkapan, instalasi dan sarana teknis.

Bagian Umum terdiri atas :

1) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
3) Subbagian Perlengkapan dan Instalasi mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, instalasi, dan sarana teknis.

b. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan di bidang pertanian, pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;
2) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
3) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
5) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan.

Bidang Program dan Kerjasama terdiri dari :

1) Seksi Program dan Kerja Sama, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerjasama dan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur di bidang pertanian, serta pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya.
2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pelaporan.

c. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan nonaparatur pertanian, serta pengelolaan unit inkubator usaha tani.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

1) Pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut;
2) Pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis dan profesi bagi aparatur dan nonaparatur di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut;
3) Pemberian pelayanan penyelenggaraan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis bagi aparatur dan nonaparatur;
4) Pengelolaan unit inkubator usahatani.

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan terdiri dari :

1) Seksi Pelatihan Aparatur, mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional, teknis dan profesi, serta pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur;
2) Seksi Pelatihan Nonaparatur, mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis dan profesi, serta pengembangan model dan teknik pelatihan teknis bagi non aparatur di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut, serta pengelolaan unit inkubator usaha tani;

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional widyaiswara, serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara mempunyai tugas :

1) Melakukan pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompotensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
2) Melakukan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
3) Melakukan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri.
4) Melakukan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur.
5) Melakukan uji kompetensi di bidang pertanian;
6) Melakukan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
7) Melakukan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut;
8) Melakukan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
9) Melakukan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
10) Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala.

2. Tata Kerja BBPP Binuang

a. Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi BBPP Binuang dan dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
b. Setiap Kepala Satuan organisasi di lingkungan BBPP Binuang wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
c. Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BBPP Binuang wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
d. Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala secara berkala dan atau sewaktu-waktu.
e. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
f. Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
g. Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Melalui Kepala Pusat Pelatihan Pertanian secara berkala dan atau sewaktu waktu;
h. Dalam melaksanakan tugas, satiap kepala satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2013 BBPP Binuang didukung oleh 62 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 31 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM PNS BBPP Binuang terdiri dari 7 orang lulusan S2; 20 orang S1/D4; 2 orang D2/D3; 25 orang SLTA; 2 orang SLTP; dan 6 orang SD. Sedangkan THL terdiri dari 2 orang S1/D4; 18 orang SLTA; 5 orang SLTP; dan 3 orang SD. Diantara 62 orang PNS yang ada terdapat 10 orang tenaga fungsional yaitu 9 orang Widyaiswara dan satu orang instruktur. Komposisi BBPP Binuang dapat dilihat pada Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4 dan Lampiran 5.

D. Lingkungan Strategis Organisasi

Lingkungan strategis organisasi BBPP Binuang terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif.

1. Dalam konteks organisasi lingkungan internal positif yaitu kekuatan (Strengths) yang dimiliki oleh BBPP Binuang dalam pelaksanaan pengembangan SDM Pertanian yaitu :
   a. BBPP Binuang memiliki anggaran yang cukup besar yang disediakan dari APBN Badan PPSDM Pertanian Kementerian Pertanian untuk melaksanakan program diklat.
   b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2013 BBPP Binuang didukung oleh SDM yang memadai yakni 62 orang PNS dan 28 orang tenaga harian lepas, serta dukungan sarana dan prasarana diklat yang memadai.

2. Adapun lingkungan internal organisasi yang negatif yaitu kelemahan (Weaknesses) dalam pelaksanaan kegiatan saat ini yang meliputi :
   a. Terbatas dan belum meratanya kualitas kemampuan petugas.
   b. Kurangnya jumlah Widyaiswara dengan spesialisasi kompetensi yang diperlukan untuk pelaksanaan program dikat.
   c. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi petugas berdasarkan SOP.
   d. Belum optimalnya upaya pejabat balai dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

3. Lingkungan strategis eksternal organisasi yang positif yaitu peluang (Opportunities) dalam kegiatan yang meliputi:
   a. Adanya Balai Diklat Pertanian (BDP) milik pemerintah Daerah di wilayah kerja BBPP Binuang yakni di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat; Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S); dan Lembaga Mandiri yang Mengakar pada Masyarakat (LM3); dan Gapoktan yang mendukung pengembangan SDM pertanian.
   b. Keberadaan petugas teknis pertanian, penyuluh pertanian, PNS, THL TBPP dan penyuluh swadaya yang mendukung kegiatan di daerah.
   c. Dukungan kerjasama dinas, badan, kantor lingkup pertanian di wilayah kerja BBPP Binuang pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

4. Sedangkan lingkungan strategis eksternal organisasi yang negatif yaitu tantangan (Threats) dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :
   a. Kualitas SDM sebagian besar petani masih rendah terutama di bidang pendidikan formal.
   b. Kurangnya minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian.
   c. Luasnya wilayah kerja BBPP Binuang serta mahal dan sulitnya menjangkau lokasi petugas (aparatur) dan petani (non aparatur) di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Stratejik (Renstra)

Rencana Stratejik BBPP Binuang Tahun 2010 – 2014 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Visi

Visi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang adalah “Menjadi Centre Of Exellence dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berwawasan global”.

2. Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut BBPP Binuang menetapkan 7 (tujuh) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas rencana program, pemantauan evaluasi, pelaporan dan pengendalian.
2. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama, jejaring kerja dan sistem informasi pertanian.
3. Mendayagunakan sumberdaya manusia *(brainware),* prasarana dan sarana *(hardware)* Balai dalam rangka pengembangan SDM Pertanian.
4. Meningkatkan kompetensi ketenagaan pelatihan.
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan, sistem dan prosedur dan norma penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan teknik pelatihan teknis, fungsional, kewirausahaan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan konsultasi agribisnis dan pengembangan pola/model pelatihan teknis, dan kewirausahaan pertanian.
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, manajemen monitoring dan evaluasi.

3. Tujuan

Dengan mengacu kepada visi dan misi tersebut diatas tujuan yang ingin dicapai BBPP Binuang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan adalah sebagai berikut :

a. Menata kelembagaan pelatihan pertanian.
b. Meningkatkan kinerja ketenagaan ketenagaan pelatihan pertanian;
c. Meningkatkan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian;
d. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani;
e. Meningkatkan mutu layanan pelatihan.

4. Sasaran

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BBPP Binuang dalam upaya mengembangkan dan mendayagunakan SDM pertanian disajikan dalam matriks berikut ini:

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kerja Tahun 2010 - 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	• Jumlah kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan • Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya
2. Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi	• Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan
3. Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja.	• Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan pertanian • Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan pertanian
4. Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	• Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantapan sistem Pelatihan Pertanian
5. Terlaksananya pelayanan perkantoran	• Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran
6. Tersedianyanya sarana dan prasarana mendukung pelatihan pertanian	• Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi • Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran • Luasan sarana gedung dan bangunan

5. Kebijakan dan Strategi

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang diterapkan BBPP Binuang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan mutu pelaksanaan program, kerjasama dan sistem informasi pelatihan pertanian.
b. Mendayagunakan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian.
c. Memantapkan sistem penyelenggaraan pelatihan.
d. Memperkuat fungsi pelayanan dan konsultasi agribisnis.
e. Menata sistem administrasi dan manajemen BBPP Binuang.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran, tujuan,misi, dan visi yang telah ditetapkan adalah:

a. Peningkatan efektifitas rencana program, pemantauan, evaluasi pengendalian dan pelaporan.
b. Pemantapan keberlanjutan kerjasama, jejaring kerja dan sistem informasi pertanian.
c. Optimalisasi fasilitas pelatihan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan pelatihan pertanian.
d. Peningkatan profesionalisme ketenagaan pelatihan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan dalam rangka menghasilkan SDM aparatur dan non aparatur pertanian yang profesional.
f. Peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap balai.
g. Peningkatan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan manajemen BBPP.

6. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan BBPP Binuang pada tahun 2013 adalah Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani dengan kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Mengacu kepada Renstra BBPP Binuang dan Renstra BPPSDMP Tahun 2010-2014, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPP Binuang untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan BBPP Binuang

Unit Eselon I : Badan PPSDMP
Unit Eselon II : BBPP Binuang
Tahun : 2013

No.	Sasaran Strategis	Rencana Kinerja	Target
1.	Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	• Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat yang difasilitasi dan dikembangkan • Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya 1) Klasifikasi P4S dan Pembinaan P4S 2) Penguatan P4S	1 unit 22 unit 17 unit 5 unit
2.	Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi	• Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan 1) Peningkatan profesionalisme Widyaiswara 2) Peningkatan profesionalisme petugas 3) Peningkatan kapasitas instruktur P4S	79 orang 9 orang 40 orang 30 orang
3.	Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja.	Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan • Teknis pertanian 1) Diklat Teknis Agribisnis Padi Di Lahan Sub Optimal Dan Irigasi Teknis 2) Diklat Teknis Agribisnis Jagung 3) Diklat Teknis Tanaman Kedelai 4) Diklat Teknis Tanaman Pangan 5) Diklat Teknis Agribisnis Karet 6) Diklat Teknis Agribisnis Kelapa Sawit 7) Diklat Teknis Agribisnis Kakao 8) Diklat Teknis Agribisnis Cabe 9) Diklat Teknis Agribisnis Sayur-sayuran 10) Diklat Teknis Pengolahan Hasil Pertanian 11) Diklat Optimalisasi Rancang Bangun Paket Teknologi Lahan Rawa Pasang Surut 12) Diklat Lahan Rawa Pasang Surut 13) Diklat Teknis Padi Organik 14) Diklat Diversifikasi Pangan 15) Diklat Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	1.454 orang 1.274 orang 90 orang 60 orang 60 orang 30 orang 90 orang 90 orang 30 orang 60 orang 30 orang 30 orang 90 orang 30 orang 30 orang 30 orang 41 orang 30 orang

No.	Sasaran Strategis	Rencana Kinerja	Target
		16) Diklat Teknis Perlindungan Tanaman Pangan	30 orang
		17) Diklat Perbenihan Tanaman Pangan	60 orang
		18) Diklat Agribisnis Buah	30 orang
		19) Diklat Substantif Reformasi Birokrasi	60 orang
		20) Diklat TOT Metodologi Pelatihan	30 orang
		21) Diklat Statistik Pertanian Bagi Petugas Kabupaten	54 orang
		22) Diklat Statistik Pertanian Bagi Petugas Kecamatan	189 orang
		• Fungsional Pertanian:	180 orang
		1) Diklat Dasar Ahli PP	50 orang
		2) Diklat Dasar Terampil Bagi PP	50 orang
		3) Diklat Alih Kelompok Penyuluh Pertanian	50 orang
		4) Diklat Dasar Terampil Fungsional PBT `	30 orang
		Jumlah non Aparatur Pertanian yang mengikuti pelatihan	570 orang
		• Teknis Pertanian	420 orang
		1) Diklat Teknis Agribisnis Padi di Lahan Sub Optimal dan Irigasi Teknis	60 orang
		2) Diklat Teknis Agribisnis Jagung	60 orang
		3) Diklat Teknis Agribisnis Kedelai	60 orang
		4) Diklat Teknis Tanaman Pangan	60 orang
		5) Diklat Teknis Agribisnis Kelapa Sawit	30 orang
		6) Diklat Teknis Agribisnis Karet	60 orang
		7) Diklat Teknis Agribisnis Cabe	30 orang
		8) Diklat Teknis Agribisnis Sayur-sayuran	30 orang
		9) Diklat Teknis Pengolahan Hasil Pertanian	30 orang
		• Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian	150 orang
		1) Diklat Kewirausahaan Petani Muda	30 orang
		2) Diklat Kewirausahaan Bagi Pemuda Tani	30 orang
		3) Diklat Kewirausahaan Mandiri dan Bermoral Etika	30 orang
		4) Magang bagi P4S	30 orang
		5) ATC	30 orang
4.	Tersusunnya dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	• Jumlah Dokumen Program dan Kerjasama Pelatihan Pertanian yang dihasilkan 1) Penyusunan Program dan Anggaran 2) Pengembangan Jejaring Kerjasama dalam Negeri	2 Dokumen
		• Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang dihasilkan 1) Pemantapan UPT Pelatihan Pusat dan Daerah 2) Pembinaan Mental Pegawai 3) Sistem Pengendalian Intern (SPI) 4) Pembinaan Anti Korupsi	4 Dokumen

No.	Sasaran Strategis	Rencana Kinerja	Target
		• Jumlah Dokumen Evaluasi Pelatihan Pertanian yang Dihasilkan 1) Penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan 2) Monitoring, Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut 3) Evaluasi Pasca Diklat 4) Bimbingan Lanjutan	4 Dokumen
5.	Terfasilitasinya Pelayanan Perkantoran	• Jumlah dan Waktu Pelayanan Perkantoran 1) Pembayaran Gaji, Tunjangan, Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran 2) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran • Pengadaan Toga/Pakaian Kerja/Pesuruh/Perawat/Dokter dan Tenaga Teknis Lainnya • Perawatan Gedung Kantor • Perbaikan Peralatan Kantor • Pengadaan Perlengkapan Kantor • Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 • Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 • Langganan Daya dan Jasa • Belanja Langganan Telepon • Operasional Perkantoran dan Pimpinan • Penyelenggara Kebun Praktek	12 Bulan
		• Jumlah Kendaraan Bermotor yang disediakan	2 Unit
		• Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang disediakan	32 Unit
		• Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang disediakan 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana 2) Peralatan Multimedia 3) Pengadaan Meubeleir 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana 5) Pengadaan Laboratorium Teknis Pertanian	348 Unit
		• Jumlah luas Gedung/Bangunan yang dibangun/direhab 1) Rehab Bangunan Asrama 2) Rehab Bangunan Ruang Makan 3) Rehab Bangunan Koridor 4) Peningkatan Pengaspalan Jalan 5) Rehab Kelas 6) Rehab Gerbang 7) Rehab Gedung Kantor 8) Rehab Ruang Makan	5.586 m2

Rencana Kerja Tahunan di atas adalah rencana kerja yang disusun sesuai dengan hasil revisi DIPA tanggal 24 September 2013. DIPA BBPP Binuang Tahun 2013 dengan nomor SP DIPA 018.10.2.239640/2013 tanggal 5 Desember 2012 menyediakan dana sebesar Rp. 26.036.378.000. Revisi DIPA pada tanggal 24 September 2013 adalah revisi yang dilakukan secara menyeluruh pada semua kementerian untuk penghematan anggaran negara. Revisi ini menyebabkan turunnya pagu anggaran tahun 2013 menjadi Rp.23.906.378.000,- dan juga terjadinya pengurangan beberapa target output.

C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja BBPP Binuang tahun 2013 merupakan tindak lanjut Rencana Kinerja Tahunan yang telah mendapatkan anggaran dalam DIPA. Ada kesesuaian antara RKT dengan Penetapan Kinerja BBPP Binuang karena seluruh kegiatan yang tertuang dalam RKT memperoleh alokasi anggaran dalam DIPA.

Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja yang merupakan kesepakatan/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala Balai BBPP Binuang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam Tabel 3 disajikan Penetapan Kinerja BBPP Binuang tahun 2013 berdasarkan DIPA dengan nomor SP DIPA 018.10.2.239640/2013 tanggal 5 Desember 2012.

Tabel 3. Penetapan Kinerja BBPP Binuang Tahun 2013

No.	Sasaran Strategis	Rencana Kinerja	Target
1.	Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	• Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat yang difasilitasi dan dikembangkan • Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya	1 unit 22 unit
2.	Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi	• Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan 1) Jumlah Widyaiswara yang difasilitasi dan dikembangkan 2) Jumlah tenaga teknis kediklatan yang difasilitasi dan dikembangkan 3) Jumlah instruktur P4S yang difasilitasi dan dikembangkan	112 orang 12 orang 40 orang 60 orang
3.	Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja.	• Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan` • Jumlah non Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	1.574 orang 630 orang
4.	Tersusunnya dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	• Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantapan sistem Pelatihan Pertanian	15 dokumen
5.	Terfasilitasinya Pelayanan Perkantoran	• Jumlah dan Waktu Pelayanan Perkantoran	12 Bulan

Untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah disepakati seperti tersebut di atas tersedia anggaran sebesar Rp. 26.036.378.000. Dalam perjalanan pelaksanaan kinerja di tahun 2013 terdapat revisi DIPA untuk penghematan anggaran negara dengan terbitnya DIPA BBPP Binuang hasil revisi tanggal 24 September 2013. Revisi ini mengubah pagu anggaran menjadi Rp. 23.906.378.000. Dengan berkurangnya pagu anggaran terjadi penurunan beberapa jumlah target output, sehingga Penetapan Kinerja perlu diubah pula. Berikut ini adalah Penetapan Kinerja yang telah diubah sesuai dengan revisi DIPA tersebut.

Tabel 4. Revisi Penetapan Kinerja BBPP Binuang Tahun 2013

No.	Sasaran Strategis	Rencana Kinerja	Target
1.	Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	• Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat yang difasilitasi dan dikembangkan • Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya	1 unit 22 unit
2.	Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi	• Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan 1) Jumlah Widyaiswara yang difasilitasi dan dikembangkan 2) Jumlah tenaga teknis kediklatan yang difasilitasi dan dikembangkan 3) Jumlah instruktur P4S yang difasilitasi dan dikembangkan	(79 orang) 9 orang 40 orang 30 orang
3.	Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja.	• Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan` • Jumlah non Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	1.454 orang 570 orang
4.	Tersusunnya dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	• Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantapan sistem Pelatihan Pertanian	10 dokumen
5.	Terfasilitasinya Pelayanan Perkantoran	• Jumlah dan Waktu Pelayanan Perkantoran	12 Bulan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi tercapainya visi dan misi instansi pemerintah. Penetapan kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja antara perencanaan dengan realisasi. Dokumen penetapan kinerja merupakan tolok ukur perencanaan, yang menjadi materi utama untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja sebuah instansi. Karena pelaksanaan DIPA mengalami revisi yang membolehkan berubahnya target output pada tahun 2013, sehingga terjadi perubahan target dalam dokumen Penetapan Kinerja, BBPP Binuang menggunakan DIPA hasil revisi terakhir sebagai acuan penetapan kinerja.

Jumlah anggaran program tahun 2013 (pagu setelah revisi) adalah sebesar Rp.23.906.378.000,- Sampai berakhirnya tahun anggaran 2013 capaian rata-rata realisasi fisik 101,62%, sedangkan realisasi serapan anggaran adalah sebesar Rp.21.934.327.154 (91,72%) dari target anggaran sebesar Rp. 23.906.378.000.
Hasil pengukuran kinerja fisik Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang pada tahun 2013 disajikan pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja BBPP Binuang Tahun 2013

No.	Sasaran Strategis	Rencana Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	• Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat yang difasilitasi dan dikembangkan • Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya	1 unit 22 unit	1 unit 23 unit	100,00 104,54
2.	Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi	• Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan 1) Jumlah Widyaiswara yang difasilitasi dan dikembangkan 2) Jumlah tenaga teknis kediklatan yang difasilitasi dan dikembangkan 3) Jumlah instruktur P4S yang difasilitasi dan dikembangkan	79 orang 9 orang 40 orang 30 orang	79 orang 9 orang 40 orang 30 orang	100,00 100,00 100,00 100,00
3.	Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja.	• Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan` • Jumlah non Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	1.454 orang 570 orang	1.490 orang 610 orang	102,48 107,02
4.	Tersusunnya dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	• Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantapan sistem Pelatihan Pertanian	10 dokumen	10 dokumen	100,00
5.	Terfasilitasinya Pelayanan Perkantoran	• Jumlah dan Waktu Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis “Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian” menunjukkan bahwa:

- Jumlah kelembagaan pelatihan UPT pusat yang difasilitasi dan dikembangkan realisasi kinerjanya 1 unit atau 100,00% dari target 1 unit.
- Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya realisasi kinerjanya 23 unit atau 104,54% dari target 22 unit.

Realisasi fisik keseluruhan pada sasaran strategis “Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian” adalah 104,35% sedang realisasi kinerja keuangan sasaran adalah Rp.606.827.173 atau 89,63% dari target pagu anggaran sebesar Rp 677.045.000.

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis “Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi” menunjukkan bahwa jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan profesionalisme dan kapasitasnya sebanyak 79 orang yang terdiri dari 9 orang Widyaiswara; 40 orang petugas dan 40 orang pengurus P4S realisasi kinerjanya adalah 79 orang atau 100% dari target 79 orang. Realisasi kinerja keuangan sasaran strategis “Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi” adalah Rp.266.368.200 atau 75,59% dari target pagu anggaran sebesar Rp 352.367.000.

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis “Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja” menunjukkan bahwa:

- Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya realisasi kinerjanya adalah 1.490 orang melampaui target 1.454 orang (102,48%). Jumlah realisasi ini terdiri dari 1.307 orang aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian atau 102,59% dari target 1.274 orang, dan 183 aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian atau 101,67% dari target 180 orang.
- Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya realisasi kinerjanya adalah 610 orang melampaui target 570 orang (107,02%). Jumlah realisasi ini terdiri dari 460 orang non aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian atau 109,52% dari target 420 orang, dan 150 orang non aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan kewirausahaan pertanian atau 100,00% dari target 150 orang.

Rincian realisasi pelatihan aparatur dan non aparatur yang dilaksanakan pada tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 6.

Realisasi fisik keseluruhan pada sasaran strategis “Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja” adalah 102,74%, sedangkan kinerja keuangan adalah Rp.9.350.023.394 atau 90,65% dari target pagu anggaran sebesar Rp 10.314.738.000.

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis “Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan” menunjukkan bahwa jumlah dokumen yang dihasilkan berjumlah 10 dokumen terdiri dari dokumen-dokumen (1) Penyusunan Program dan Anggaran; (2) Pengembangan Jejaring Kerjasama dalam Negeri; (3) Pemantapan UPT Pelatihan Pusat dan Daerah; (4) Pembinaan Mental Pegawai; (5) Sistem Pengendalian Intern (SPI); (6) Pembinaan Anti Korupsi; (7) Penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan; (8) Monitoring, Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut; (9) Evaluasi Pasca Diklat; dan (10) Bimbingan Lanjutan. Jumlah realisasi kinerja ini sama dengan target sebanyak 10 dokumen (100,00%).
Realisasi fisik untuk sasaran strategis “Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan” adalah 100,00%, sedangkan realisasi kinerja keuangan adalah Rp.1.140.468.287 atau 83,04% dari target pagu anggaran sebesar Rp 1.373.404.000.

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis “Terfasilitasinya Pelayanan Perkantoran” menunjukkan bahwa:

- Jumlah dan waktu pelayanan perkantoran dengan target 12 bulan telah direalisasikan 12 bulan (100%)
- Jumlah kendaraan bermotor (roda 4) yang disediakan realisasinya sebanyak 2 unit atau 100,00% dari target 2 unit.
- Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi yang disediakan realisasinya adalah 43 unit atau 134,38% dari target 32 unit.
- Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran yang disediakan realisasinya adalah 460 unit atau 132,18% dari target 348 unit.
- Jumlah luas gedung/bangunan yang dibangun/direhab realisasinya adalah 5.586 m2 atau 100,00% dari target 5.586 m2 untuk rehab bangunan asrama, rehab

bangunan ruang makan, rehab bangunan koridor, peningkatan pengaspalan jalan, rehab kelas, rehab gerbang, rehab gedung kantor, dan rehab ruang makan.

Realisasi fisik pada sasaran strategis “Terfasilitasinya Pelayanan Perkantoran” dengan indikator kinerja jumlah dan waktu pelayanan 12 bulan dihitung 100,00%%, sedangkan realisasi keuangan adalah Rp.10.563.622.230 atau 94,41% dari target pagu anggaran sebesar Rp 11.188.824.000.

B. Penilaian Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup dua hal yaitu (1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan (2) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja BBPP Binuang pada tahun 2013 pada setiap sasaran strategis bervariasi dengan kisaran dari 100,00% sampai dengan 104,35%. Apabila dilihat berdasarkan 15 output kegiatan yang ada, pada sasaran strategis “Terfasilitasinya Pelayanan Perkantoran” (lihat Lampiran 7) pelayanan perkantoran berupa perangkat pengolah data dan komunikasi yang disediakan kinerjanya mencapai 134,38%. Demikian pula jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran yang disediakan mencapai 132,18%.

Pencapaian kinerja BBPP Binuang pada tahun 2013 yakni rata-rata realisasi fisik 101,62% mencapai Nilai Atribut Interpretasi Fisik yang termasuk kategori AA (sangat memuaskan). Tingkat realisasi serapan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp.21.934.327.154 (91,72%) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 23.906.378.000. Nilai rata-rata persentasi realisasi anggaran yang dihitung berdasarkan realisasi anggaran masing-masing dari lima sasaran strategis adalah 86,66%. Berdasarkan Nilai Atribut Interpretasi Anggaran tingkat serapan anggaran ini juga termasuk kategori AA (sangat memuaskan). Secara keseluruhan berdasarkan Nilai Atribut Interpretasi Anggaran dan Nilai Atribut Interpretasi Fisik, didapatkan Nilai Atribut dan Interpretasi Kinerja BBPP Binuang Tahun 2013 sebesar 94,14% yang termasuk kategori AA (sangat memuaskan).

C. Analisis Kinerja

Capaian kinerja fisik pada kelima sasaran strategis telah mencapai target, bahkan ada dua sasaran strategis yang realisasinya melampaui target 100%. Walaupun demikian realisasi keuangan tidak mencapai 100% yang berarti bahwa masih ada anggaran yang belum mampu dimanfaatkan dari total pagu anggaran DIPA yang tersedia. Selain dana yang memang merupakan sisa mati, sisa anggaran ini juga merupakan hasil efisiensi dan juga anggaran beberapa komponen kegiatan yang tidak seluruhnya termanfaatkan.

Pada sasaran strategis "Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi" kegiatan peningkatan profesionalisme Widyaiswara (9 orang) tidak banyak memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk "belanja barang non operasional lainnya". Hal ini terjadi karena kegiatan peningkatan profesionalisme Widyaiswara lebih banyak berupa kegiatan mengikuti pelatihan atau mengikuti seminar/workshop yang sifatnya berupa undangan dari instansi lain. Kegiatan ini pada umumnya hanya memerlukan dana perjalanan dinas dan tidak memerlukan komponen dana belanja barang/bahan tersebut. Komponen dana ini akan bisa ditingkatkan pemanfaatannya apabila Widyaiswara melakukan kegiatan magang atau kegiatan kajiwidya sesuai dengan bidang spesialisasinya. Pada tahun 2014 perlu perencanaan kegiatan magang dan kajiwidya bagi Widyaiswara yang lebih baik, yang diarahkan kepada peningkatan kompetensi Widyaiswara dalam memfasilitasi proses pembelajaran.

Pada sasaran strategis "Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja" terdapat efisiensi dalam penggunaan dana perjalanan dinas peserta pelatihan, baik pelatihan bagi aparatur maupun pelatihan bagi non aparatur. Efisiensi dana ini digunakan untuk optimalisasi kegiatan berupa penambahan kelas pelatihan, masing-masing satu kelas pelatihan teknis pertanian bagi aparatur (24 orang) dan satu kelas pelatihan teknis pertanian bagi non aparatur (40 orang).

Sisa anggaran perjalanan peserta pelatihan terjadi karena peserta-peserta yang jauh lokasi tugasnya (dari Kalbar, Kalteng dan Kaltim) sebagian tidak datang menghadiri pelatihan sehingga diganti dengan peserta yang lebih dekat (Kalsel) yang tidak

memerlukan dana perjalanan yang besar. Tidak datangnya peserta dari lokasi yang jauh seperti dikemukakan di atas disebabkan oleh sulitnya perjalanan dari lokasi asal peserta ke BBPP Binuang serta ketidakmampuan peserta untuk menyediakan secara pribadi dana talangan untuk biaya perjalanan ke BBPP Binuang. Biaya perjalanan peserta pelatihan, baik peserta aparatur maupun peserta non aparatur selama ini sebagian besar ditalangi sendiri oleh masing-masing peserta, tidak disediakan oleh instansi pengirim. Penggantian dana perjalanan peserta dilakukan oleh BBPP Binuang setelah peserta di tempat pelatihan. Cara yang ditempuh untuk pemecahan masalah ini pada tahun 2013 adalah dengan melaksanakan pelatihan di balai diklat milik pemerintah daerah di wilayah kerja BBPP Binuang yaitu Balai Pendidikan dan Latihan Penyuluh Pertanian (BPLPP) Anjungan Kalbar dan Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Sempaja Kaltim.

Pelaksanaan di BPLPP Anjungan Kalbar (bagi peserta pelatihan yang berasal dari Kalbar) dan di Bapeltan Sempaja Kaltim dapat mengurangi ketidakseimbangan komposisi peserta karena tidak ada penggantian peserta dari lokasi yang jauh (Kalbar dan Kaltim) dengan peserta yang lebih dekat (dari Kalsel). Tentu saja penempatan kegiatan pelatihan di balai diklat milik pemerintah daerah ini tetap mempertimbangkan kesesuaian jumlah dan persyaratan peserta serta prioritas dukungan terhadap pencapaian empat target kementerian pertanian khususnya pencapaian swasembada pangan. Penempatan kegiatan di balai daerah dapat meningkatkan jumlah kehadiran peserta serta jumlah peserta yang memenuhi persyaratan pelatihan.

Untuk tahun 2014 penetapan alokasi peserta pelatihan dari setiap kabupaten/kota pada awal tahun diharapkan akan dapat menjamin kehadiran peserta sehingga target output kegiatan pelatihan dapat tercapai. Dengan demikian pertemuan koordinasi persiapan pelatihan dengan dinas/badan/kantor pengirim peserta serta instansi terkait lainnya perlu dilakukan.

Pencapaian realisasi serapan anggaran BBPP Binuang tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya penurunan. Perbandingan realisasi serapan anggaran BBPP Binuang dari tahun 2010 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6 . Realisasi Serapan Anggaran BBPP Binuang Tahun 2010 - 2013

No.	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2010	16.048.651.000	13. 214.584.349	82,36
2	2011	13.278.139.000	11.653.568.744	87,77
3	2012	21.139.686.000	19.969.559.049	94,23
4	2013	23.906.378.000	21.927.309.284	91,72

Penurunan persentase serapan ini perlu diperbaiki dengan melakukan persiapan dengan lebih baik pada awal tahun 2014. Diperlukan adanya koordinasi intern dan ekstern yang lebih optimal agar tingkat serapan anggaran dapat meningkat dengan tetap menjaga mutu output kegiatan.

D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

Persentasi efisiensi capaian indikator kinerja dihitung dengan mengurangi 100% dengan perbandingan antara jumlah realisasi anggaran per realisasi output dengan jumlah pagu anggaran per target output. Efisiensi menggambarkan adanya realisasi penghematan penggunaan anggaran untuk menghasilkan output.

Efisiensi capaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- Pada sasaran strategis “Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian” terdapat efisiensi dengan nilai 0,14 atau 14%.
- Pada sasaran strategis “Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi” terdapat efisiensi dengan nilai 0,24 atau 24%.
- Pada sasaran strategis “Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja” terdapat efisiensi dengan nilai 0,13 atau 13%
- Pada sasaran strategis “Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan” terdapat dengan 0,17 atau 17%.
- Pada sasaran strategis “Terfasilitasinya Pelayanan Perkantoran” terdapat efisiensi dengan nilai 0,06 atau 6%.

Secara keseluruhan rata-rata efisiensi yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2013 adalah 0,15 atau 15%. Rincian perhitungan efisiensi capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran 6.

Meskipun capaian kinerja termasuk dalam kategori efisien, namun masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Proses perencanaan belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang terintegrasi dengan baik. Dimasa yang akan datang perlu diupayakan:
   a. Peningkatan koordinasi antar masing-masing bagian/bidang lingkup BBPP Binuang dalam proses perencanaan;
   b. Perbaikan kualitas TOR untuk masing-masing kegiatan;
   c. Perbaikan kualitas SOP dan pelaksanaan SOP
2. Perencanaan kegiatan khususnya pelatihan belum melibatkan semua instansi pengirim/instansi pembina peserta. Dimasa yang akan datang perlu lebih dilaksanakan pertemuan koordinasi dengan semua instansi yang terkait.
3. Jumlah dan kualitas kompetensi SDM petugas kediklatan baik Widyaiswara maupun tenaga kediklatan lainnya masih belum memadai untuk dapat melaksanakan kegiatan yang bermutu tinggi. Dimasa yang akan datang perlu dirancang kegiatan peningkatan prodesionalisme Widyaiswara dan petugas yang memberi dampak peningkatan kompetensi yang dapat meningkatkan mutu pelayanan dan mutu output kegiatan.
4. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya konsisten dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga beberapa kegiatan dilaksanakan mendekati batas akhir waktu pencairan dana. Dimasa yang datang perlu dilakukan:
   a. Pengendalian pelaksanaan kegiatan yang lebih intensif melalui pertemuan reguler.
   b. Peningkatan komitmen para pejabat dan pelaksana di semua tingkatan manajemen.

BAB IV
PENUTUP

LAKIP Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang tahun 2013, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lima sasaran strategis BBPP Binuang pada tahun 2013 dapat diketahui bahwa realisasi berkisar antara 100,00% s.d. 104,35%; sedangkan efisiensi kinerja pada berkisar antara 0,06 s.d. 0,24 dengan rata-rata 0,15 atau 15%. Kinerja yang melampaui 100% adalah pada sasaran strategis “Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian” dan “Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja”.

Meskipun capaian kinerja kegiatan telah mencapai target dan termasuk dalam kategori efisien, namun masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pada tahun 2013. Untuk mengatasi masalah dan kendala ini maka pada tahun 2012 perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan; peningkatan koordinasi baik intern organisasi maupun koordinasi dengan instansi pengguna jasa diklat, instansi penyelenggara diklat dan pemangku kepentingan pelatihan lainnya; peningkatan jumlah dan kualitas kompetensi SDM BBPP Binuang; pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dengan lebih intensif serta peningkatan komitmen para pejabat dan pelaksana di semua tingkatan manajemen.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
PNS	46	16	62
THL	26	5	31
Jumlah	69	21	93

*) THL terdiri dari tenaga lapangan (pengelola pekarangan, lahan praktek dan asrama), Satpam tenaga dokter dan paramedik

Lampiran 2. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	PNS (Orang)	THL (Orang)	Jumlah (Orang)
SD	6	3	9
SLTP	2	5	7
SLTA	25	20	43
S0 / Diploma	2	-	2
S1 / D4	20	3	22
S2	7	-	7
S3	0	-	0
Jumlah	62	31	93

Lampiran 3. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Pangkat / Golongan

Pangkat	Golongan	Jumlah PNS (Orang)
Juru Muda	I/a	-
Juru Muda Tk.I	I/b	1
Juru	I/c	2
Juru Tk. I	I/d	4
Pengatur Muda	II/a	2
Pengatur Muda Tk. I	II/b	7
Pengatur	II/c	5
Pengatur Tk. I	II/d	3
Penata Muda	III/a	6
Penata Muda Tk. I	III/b	10
Penata	III/c	7
Penata Tk. I	III/d	8
Pembina	IV/a	3
Pembina Tk. I	IV/b	1
Pembina Utama Muda	IV/c	3
Pembina Utama Madya	IV/d	-
Pembina Utama	IV/e	-
Jumlah		62

Lampiran 4. Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan Fungsional	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Widyaiswara Pertama	2	-	2
Widyaiswara Muda	2	1	3
Widyaiswara Madya	4	-	4
Widyaiswara Utama	-	-	-
Instruktur Penyelia	-	1	1
Jumlah	8	2	10

Lampiran 5. Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
SLTA	-	1	1
S0 (D-1, D-2, D-3)	-	-	-
S1 / D4	4	-	4
S2	4	1	5
S3	-	-	-
Jumlah	8	2	10